

Negosiasi Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Deskriptif pada Seorang Anggota Legislatif Perempuan di DPR RI)

Anggi Anggraeni

Program Studi Psikologi

Universitas Muhammadiyah Bandung

Abstract

The phenomenon political women in public sector still become problems. It is because women pursued to be active in public, but on the other side she has to care her husband and children. The aim of research is show political women rule out and negotiate her role in public and domestic sector. The research uses qualitative method with description study. The subject is Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Ph.D one of the member in DPR RI at Komisi V. Within deep interview, observation, records from social network that having from subject, electronic mailing, curriculum vitae, articles, a blog, researcher gets a lot of information. The results show that there are several factors that political women succeed within their role in public and domestic sector, especially from family support. A good strategy and negotiation in region environment can be a contributing factor that lead women to the successful role in public and domestic sector. There is a recommendation for women within their role in public and domestic sector is to share the task with husband and children in the household, and involve their husband in deciding certain matters relating to their duties in their public sector.

Keywords: *Role Negotiation, Public and Domestic Sector*

Abstrak

Fenomena masuknya perempuan ke ruang publik khususnya dalam bidang politik sampai saat ini masih menyimpan dilema yang mendalam. Hal ini dikarenakan selain harus berperan aktif dalam ruang publik, disisi lain dalam ruang domestik perempuan juga dituntut menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya. Penelitian ini menggali bagaimana perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik menjalankan dan menegosiasikan perannya dalam ruang publik dan domestik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Ph.D yang merupakan anggota legislatif yang duduk di Komisi V DPR RI. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh melalui catatan harian di salah satu situs jejaring sosial milik responden, surat elektronik antara responden dengan peneliti, riwayat hidup responden, dan dokumen pribadi serta tulisan-tulisan responden baik berupa artikel, maupun tulisan di web pribadinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan yang diperoleh seorang perempuan yang berperan ganda di ruang publik dalam hal ini

pada bidang politik dan domestik tidak terlepas dari dukungan dan kerelaan yang diberikan oleh keluarga terutama suami dan anak-anak. Selain itu adanya proses negosiasi dan strategi yang dijalankan dengan baik dengan orang-orang dan lingkungan sekitar dapat membantu perempuan untuk menjalankan perannya dalam kedua ranah tersebut (ruang publik dan domestik). Adapun saran yang diajukan untuk perempuan yang menjalankan peran ganda dalam ruang publik dan domestik adalah membagi tugas dengan suami dan anak-anak dalam mengurus rumah tangga, serta melibatkan suami dalam memutuskan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan tugasnya dalam ruang publik.

Kata Kunci: Negosiasi Peran, Ruang Publik dan Domestik

Pendahuluan

Ditetapkannya kuota 30 persen untuk keterlibatan perempuan dalam proses politik yang secara legal masuk dalam Undang-undang partai politik merupakan terobosan besar dalam sejarah produk perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dikatakan terobosan besar sebab selama ini dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak pernah ada sebuah Undang-undang yang memuat secara khusus untuk mendukung secara hukum eksistensi perempuan dalam bidang politik di legislatif. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa:

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

Hal ini jelas menegaskan bahwa partai politik berdasarkan Undang-undang partai politik tahun 2008 dituntut penuh komitmennya untuk ikut mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia melalui keterlibatan perempuan dalam bidang politik pada aspek pendirian, kepengurusan, hingga pendidikan politik untuk kaum perempuan. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik:

“Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender”

Berdasarkan data yang dikeluarkan CETRO tentang data dan fakta: Keterwakilan Perempuan Indonesia di Partai Politik dan Lembaga Legislatif, pada tahun 1999-2001 jumlah perempuan di parlemen tidak banyak meningkat (Mahmada, 2008). Begitupula pada masa Orde Baru maupun pasca Orde Baru (1999-2004). Ketika pemilu di era Reformasi penurunan keterwakilan perempuan terjadi, perempuan Indonesia yang menjadi anggota DPR tidak sampai 15 persen, begitupula di lembaga MPR jumlahnya masih minim yaitu dibawah 20 persen. Namun, pada pemilu tahun 2004, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif mulai meningkat kembali. Pada tahun 2009 jumlah anggota perempuan di parlemen dianggap paling banyak bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,86 persen. Sedangkan tahun 2014 menurun menjadi 17,32 persen. Selain itu di lembaga eksekutif dalam Kabinet Kerja terdapat peningkatan

jumlah menteri perempuan. Beberapa menteri perempuan telah diberi kepercayaan untuk memimpin Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN yang sebelumnya dipimpin oleh laki-laki. Dari sini terlihat adanya kemajuan, karena sebelumnya perempuan hanya dipercaya membawahi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Banyak manfaat yang didapat ketika perempuan masuk ke dalam bidang politik. Salah satunya adalah terwakilinya aspirasi perempuan yang berdampak pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan dan anak. Selain terbitnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan, anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dari tahun ke tahun mulai meningkat. Dari sini terlihat, bahwa masuknya perempuan dalam bidang politik telah menciptakan keseimbangan dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak yang berimplikasi pada terwakilinya aspirasi perempuan dan anak.

Namun pada kenyataannya, walaupun negara mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam bidang politik, masuknya perempuan dalam bidang politik masih menemui banyak hambatan. Hambatan ini berimplikasi pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Aturan kuota 30 persen untuk keterlibatan perempuan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ternyata hanya mengatur pencalonan perempuan dalam legislatif, bukan pada hasil akhir komposisi dalam keanggotaan legislatif. Menurut Mahmada, hambatan yang paling besar ketika perempuan akan masuk dalam bidang politik adalah dari partai politik itu sendiri. Partai politik beralasan hal itu dikarenakan kurang tersedianya perempuan yang bagus dan layak untuk bisa masuk ke partai politik (Mahmada, 2008). Inggard Yoshua, Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta berpendapat bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik khususnya di legislatif dikarenakan dunia politik merupakan bidang yang agak keras, menuntut para anggotanya untuk rapat hingga larut malam (Hanim, 2010). Selain itu minat yang rendah dari kaum perempuan, karena persepsi yang kurang baik mengenai politik, karena *image* dunia politik yang penuh dengan intrik,

konflik, dan banyak persoalan lainnya, sehingga perempuan mengaku bahwa mereka tidak cukup waktu apalagi jika bekerja hingga larut malam (Hanim, 2010).

Menurut Sardjono rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki (Sardjono, 2002). Budaya yang dipengaruhi oleh sistem patriarki ini, memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional yang mengharuskan perempuan menjaga kesalehan serta kemurnian, bersikap pasif dan menyerah, rajin mengurus keluarga dan rumah tangga, serta harus rela berada dalam kekuasaan laki-laki, sehingga perempuan harus menerima perannya berdasarkan keadaan biologisnya baik sebagai istri dan ibu rumah tangga yang bekerja dalam ruang domestik (Sardjono, 2002).

Fenomena masuknya perempuan ke ruang publik khususnya dalam bidang politik, diakui oleh Lestari masih menyimpan dilema yang mendalam (Lestari, 2009). Menurut Lestari (2009, 91):

“Disatu sisi perempuan dituntut bersikap elegan dan memiliki penguasaan diri yang tinggi saat berhadapan dengan publik, namun disisi lain dalam ruang domestik perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga yang penuh cinta kasih, pengabdian, dan setia, bahkan harus rela menjadi orang kedua setelah kepala rumah tangga (suami) yang sering kali merasa tidak “nyaman” dengan kiprah istri di ruang publik”

Hal ini menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi antara ruang publik dan domestik merupakan salah satu faktor yang juga menghambat perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, perempuan yang berpartisipasi di ruang publik kerap kali mengalami konflik peran karena harus menjalani peran ganda. Menurut Altman dalam Dzulfa (2009), seseorang yang memainkan peran ganda dalam kehidupannya akan mengalami konflik peran (*role conflict*). Hal ini dikarenakan terjadinya pertentangan antara satu peran dengan peran yang lainnya. Permasalahan seperti ini pada akhirnya sangat

berpengaruh pada perempuan dalam menentukan posisinya di ruang publik. Perempuan yang terlibat dalam ruang publik seringkali harus berperan ganda karena masih harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan domestik.

Menghadapi permasalahan diatas diperlukan adanya strategi yang tepat dari kaum perempuan, agar perempuan dapat berperan aktif dalam bidang politik tanpa melupakan kodrat dan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya. Strategi ini mungkin dimiliki oleh perempuan-perempuan yang berhasil berkiprah di ruang publik, khususnya di bidang politik, sekaligus di bidang domestik. Keberhasilan tersebut salah satunya berkaitan dengan negosiasi peran perempuan dalam kedua ranah tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai subjek (dalam hal ini perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik) menjalankan dan menegosiasikan perannya dalam ruang publik dan domestik. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti memerlukan subjek yang representatif. Subjek tentu saja harus merupakan seorang perempuan yang berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik (dalam hal ini anggota legislatif perempuan di DPR RI) sekaligus memiliki peran sebagai ibu serta istri bagi keluarganya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti memilih Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD sebagai responden dalam penelitian ini. Beliau merupakan anggota legislatif yang telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode dari tahun 2009, memiliki satu orang suami dan empat orang anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008). Wawancara dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam, dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden. Peneliti juga melakukan korespondensi dengan narasumber melalui surat elektronik dan menggunakan berbagai dokumen lain sebagai data pendukung seperti catatan harian di salah satu situs jejaring sosial (*facebook*) milik responden, riwayat hidup

responden, serta tulisan-tulisan responden baik itu berupa artikel maupun tulisan di web pribadinya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, tahap kedua adalah *display data*, dan tahap ketiga adalah verifikasi data (Sugiyono, 2008). Tahap pertama yang dilakukan untuk mengkaji informasi dari responden adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2011). Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Sedangkan menurut Moleong (2008), reduksi data adalah usaha untuk mengidentifikasi bagian terkecil dari data yang memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus atau masalah penelitian. Tahap kedua yang dilakukan setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data (menyajikan data). Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif dari data yang telah direduksi, kemudian dimasukkan kedalam indikator-indikator atau aspek yang digali yang telah ditentukan sebelumnya yang akan dijadikan bahan untuk melakukan analisis. Tahap ketiga yang dilakukan dalam menganalisis data adalah verifikasi (penarikan kesimpulan). Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam satu indikator, muncul kembali dalam indikator berikutnya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan satu sama lain antar indikator, maka dapat diambil kesimpulan umum dari pernyataan responden yang akan dijadikan dasar bagi proses analisis selanjutnya. Setelah diperoleh kesimpulan umum dari semua indikator atau aspek yang digali, maka peneliti mulai menyusun interpretasi dasar mengenai pernyataan dari responden. Analisis ini dibagi menjadi per indikator atau aspek yang digali tetapi tetap memiliki hubungan dengan indikator atau aspek-aspek lainnya.

Untuk mengecek keabsahan data yang telah diperoleh, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut diantaranya memperpanjang waktu penelitian, analisis terhadap dokumen pribadi responden, dan melakukan wawancara terhadap suami dan anak responden.

Hasil Pembahasan

Pembahasan dibagi kedalam tiga tema besar. Pertama dibahas mengenai peran subjek dalam ruang publik, pembahasan yang kedua bagaimana peran subjek dalam ruang domestik, yang terakhir dibahas mengenai bagaimana negosiasi peran yang dilakukan oleh subjek dalam ruang publik dan domestik, serta strategi yang dijalankan dalam ruang publik dan domestik.

1. Peran Subjek dalam Ruang Publik

Ruang publik bukan hal yang asing lagi bagi subjek. Subjek sudah lama berkecimpung di ruang publik. Bahkan sejak kuliah subjek sangat aktif mengikuti kegiatan organisasi di kampusnya. Semenjak kuliah subjek sudah memiliki kesadaran tentang kesenjangan wilayah, banyak mengkritisi situasi pembangunan yang pada saat itu dianggap sangat elitis dan hanya mementingkan pembangunan di kota-kota. Hal inilah yang membuatnya memutuskan untuk membentuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan kajian pada persoalan masyarakat, gender, sosial, ekonomi, serta masalah yang dialami oleh kaum marjinal. Apa yang dilakukan oleh subjek ini dipandang oleh Almond dalam Hanim (2010) sebagai fase pembentukan sikap politik. Dimana ada korelasi tertentu antara pengalaman dalam keluarga dan pengalaman di sekolah dengan sikap politik individu di kemudian hari. Pembentukan sikap politik ini menurut Hanim (2010), akan berlanjut setelah individu menjadi dewasa dan memasuki peran politiknya. Subjek yang saat ini aktif pada ruang publik (dalam hal ini di bidang politik) merupakan hasil bentukan di masa lalu.

Pada tahun 1998 dimana situasi politik di Indonesia mulai berubah, muncul gagasan untuk membuat suatu kerjasama dengan pemerintah. Kemudian subjek dan teman-temannya membentuk suatu organisasi yang merupakan kombinasi antara LSM dengan konsultan. Organisasi ini bekerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan lokal melalui pendekatan kemitraan atau *partnership* dengan pemerintah. Apa yang dilakukan oleh subjek dan teman-temannya selalu berhasil. Namun, walaupun program yang diusung pada saat itu terbilang sukses, tidak serta merta membuat subjek puas. Karena Ia beranggapan advokasi dan aktivitas yang dilakukannya menghasilkan perubahan yang lambat, dan subjek cenderung tidak sabar untuk menunggu proses itu. Akhirnya Ia mencoba naik ke

tingkat pusat dengan membentuk aturan-aturan di tingkat pusat. Kemudian muncullah ide untuk masuk ke dalam bidang politik, karena Ia beranggapan ketika menjadi *decision maker* usulan yang Ia berikan keputusannya akan jauh lebih cepat. Pada tahun 2008, subjek memutuskan untuk mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kota Bandung. Namun pada saat itu subjek gagal di calonkan menjadi calon Walikota. Hal ini dikarenakan subjek merupakan calon independen dan bukan berasal dari partai. Sebab pada kenyataannya partai politik lah penentu siapa yang akan menjadi calon Walikota. Karena di Indonesia sumber-sumber kepemimpinan datangnya dari rekrutmen partai.

Pada tahun 2009 akhirnya subjek bergabung pada salah satu partai dan berhasil membawanya menjadi anggota DPR RI hingga saat ini. Kesuksesan subjek menjalankan perannya dalam ruang publik tidak terlepas dari dukungan suami dan anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Subjek menuturkan sejak awal suaminya aktif terlibat dalam pembuatan rancangan program, pendanaan, dan ikut melakukan sosialisasi pada warga saat kampanye. Menurut Arri (2009), dukungan suami merupakan faktor yang penting bagi perempuan dalam menjalankan tugasnya di ruang publik. Kurangnya dukungan yang diberikan oleh suami membuat peran perempuan dalam bekerja tidak optimal. Gottlieb dalam Arri (2009), juga menambahkan bahwa dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan subjek dapat memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dari sini terlihat tanpa adanya dukungan dan kerelaan dari keluarga, sangat sulit bagi perempuan untuk bisa eksis di ruang publik. Selain itu, kerelaan suami dan anak-anak juga merupakan energi utama bagi setiap perempuan yang memilih politik sebagai media perjuangannya.

2. Peran Subjek dalam Ruang Domestik

Terkait dengan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu keluarganya, strategi yang subjek terapkan adalah sebisa mungkin selalu memaksimalkan perannya sebagai seorang ibu dan istri bagi suami dan anak-anaknya saat memiliki waktu luang. Waktu luang dijadikan sebagai “pembayar hutang” ketika ada kewajiban yang tidak bisa dilakukan kepada suami dan anak-anak ketika menjalankan peran dalam ruang publik. Inilah yang disebut dengan *quality time*. *Quality time* atau waktu yang berkualitas bisa dikatakan sebagai manajemen penggunaan waktu yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur

dan mensinergikan waktu dengan optimasi *benefiditas* (kebermanfaatan) atau *utility* (kebergunaan) setiap aktivitas seseorang (Hidayati, 2011). Dari sini kita bisa lihat bagaimana subjek menggunakan *quality time*, yaitu dengan cara menghabiskan waktu dengan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan sebuah kebersamaan, kedekatan, dan kekuatan sebuah hubungan batin dengan anak, suami, dan keluarganya.

Terkait dengan pembagian tugas dengan keluarga, perempuan yang aktif berkiprah dalam ruang publik haruslah mampu membagi tugas dengan suami dan anak-anak, serta melakukan pendelegasian tugas kepada pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar beban dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sedikit berkurang, sehingga perempuan bisa lebih berkonsentrasi dalam mengerjakan tugasnya di ruang publik. Namun demikian, subjek menjelaskan bahwa suaminya tidak segan untuk men *take over* atau mengambil alih tugas-tugas konvensional, yang selama ini dianggap sebagai tugas perempuan. Dari sini kita bisa lihat bahwa pembagian peran yang dilakukan oleh subjek dan suaminya tidak berdasarkan atas konstruksi gender tradisional yang berkaitan dengan sifat maskulinitas dan feminitas yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam masyarakat tradisional dikenal dengan pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai pengasuh (*nurturer*), atau dengan kata lain perempuan mengurus wilayah domestik, laki-laki mengurus wilayah publik (Hanim, 2010). Pembagian peran yang dilakukan oleh subjek dan suaminya lebih kepada kemampuan individu itu sendiri dalam mengerjakan sesuatu hal. Sehingga subjek dan suaminya sama-sama memiliki peran gender yang egaliter (sama) dalam mengurus rumah tangga.

3. Negosiasi Peran dalam Ruang Publik dan Domestik

Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh subjek kepada dirinya agar ia dapat berperan aktif dalam ruang publik sekaligus berperan dalam ruang domestik. Strategi itu dimasukan kedalam tiga kategori. Diantaranya menjaga kesejahteraan mental, pendelegasian tugas, dan negosiasi dengan suami dan anak-anak.

Aktivitas sebagai anggota DPR RI dengan beban kerja yang cukup tinggi menjadikan para pelakunya sangat rentan terhadap stress. Menghadapi persoalan seperti

ini diperlukan adanya pemeliharaan unsur psikologis atau menjaga kesehatan mental untuk mencegah atau bahkan mengurangi timbulnya stress pada diri. Menurut Zakiah Daradjat dalam Yusuf (2009), kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Hal ini pula lah yang diterapkan subjek untuk menjaga kelangsungan hidupnya dalam menjalani aktivitasnya dalam ruang publik dan domestik. Upaya dalam menjaga kesehatan mental dilakukan oleh subjek dengan cara sebagai berikut: memilih prioritas dan membuat perencanaan yang baik, menumbuhkan rasa syukur, menjauhi rasa bersalah dan rasa sakit hati, melakukan penguatan diri.

Profesi sebagai anggota dewan yang memiliki kegiatan yang sangat padat membuat para pelakunya harus membagi dan menyerahkan beberapa tugasnya kepada orang-orang sekitar. Ini dimaksudkan untuk meringankan bebannya, sehingga bisa fokus pada hal lain yang dianggap lebih penting. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbagi tugas dengan suami dan anak-anak, serta mendelegasikan tugas kepada pembantu rumah tangga, sopir, dan tukang kebun dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, memperkuat jaringan dan kerjasama dengan orang-orang sekitar. Subjek mengakui bahwa tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan sendiri. Maka yang ia lakukan adalah memperbaiki kerjasama dan memperkuat hubungan serta jaringan dengan orang-orang sekitar, baik itu suami, anak, asisten rumah tangga, sisten, dan staf ahlinya.

Terkait dengan negosiasi yang dilakukan dengan suami dan anak-anaknya, hal ini merupakan tantangan yang harus subjek hadapi. Subjek harus mampu meyakinkan dan 'bertransaksi' dengan suami dan anak-anaknya. Misalnya suaminya berkorban sesuatu untuk dirinya, dilain waktu subjek juga harus rela mengorbankan sesuatu untuk suaminya. Inilah salah satu yang menjadi karakteristik dari proses negosiasi. Menurut Baguley (2003), negosiasi memiliki sejumlah karakteristik, salah satunya adalah menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Baguley (2003), menjelaskan bahwa negosiasi merupakan cara bertukar sesuatu baik berupa tawar menawar atau tukar menukar baik itu barang maupun sebuah kesepakatan. Bila dilihat, proses negosiasi yang diterapkan oleh subjek bersama keluarganya adalah negosiasi yang menciptakan hasil menang-menang. Artinya tidak ada

satu pihak pun yang merasa dirugikan atas keputusan yang diambil. Hal ini pula yang dibahas oleh Covey (1997), dalam bukunya yang berjudul *7 Habits of Highly effective People*, bahwa kebiasaan keempat yang perlu diperhatikan dalam interaksi manusia adalah berpikir menang-menang (*think win-win*). Menurut Covey (1997), berpikir menang-menang adalah terus menerus berusaha mencari manfaat bersama dalam setiap interaksi manusia. Inilah yang merupakan negosiasi yang sempurna untuk kemenangan bersama.

Simpulan

Kesuksesan yang diperoleh seorang perempuan yang berperan ganda di ruang publik (dalam hal ini pada bidang politik) dan domestik tidak terlepas dari dukungan dan kerelaan yang diberikan oleh keluarga terutama suami dan anak-anak. Dukungan dan kerelaan yang diberikan oleh suami dan anak-anak merupakan salah satu bentuk dukungan yang akan sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam menjalankan tugasnya di ruang publik. Selain itu adanya proses negosiasi dan strategi yang yang dijalankan dengan baik dengan orang-orang dan lingkungan sekitar dapat membantu perempuan untuk menjalankan perannya dalam ruang publik dan domestik. Strategi yang dilakukan oleh subjek berkaitan dengan perannya dalam ruang publik dan domestik dimasukkan kedalam tiga kategori, diantaranya:

1. Menjaga kesehatan mental

Memilih prioritas dan membuat perencanaan yang baik, menumbuhkan rasa syukur, menjauhi rasa bersalah dan rasa sakit hati, melakukan penguatan diri.

2. Pendelegasian tugas

Dalam ruang domestik: berbagi tugas dengan suami dan anak-anak dalam mengurus rumah tangga, mendelegasikan tugas kepada pembantu rumah tangga, sopir, dan tukang kebun dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Dalam ruang publik: mendelegasikan tugas kepada staf ahli, asisten, media, dan memperkuat jaringan.

3. Negosiasi dengan suami dan anak-anak

Melibatkan suami dan anak-anak pada kegiatannya sebagai anggota Dewan, menumbuhkan rasa saling ketergantungan antara anak yang satu dengan

lainnya, memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dalam keluarga, menjalin komunikasi yang manis, serta membayar hutang waktu.

Saran

- a. Saran bagi perempuan yang menjalankan peran ganda dalam ruang publik dan domestik
 - Jika perempuan ingin masuk ke dalam wilayah publik atau dengan kata lain ingin bekerja, maka perempuan harus bersedia menanggung beban ganda (*double burden*), tentu tidak ada salahnya jika perempuan membagi tugas dengan suami dan anak-anak dalam mengurus rumah tangga. Hal ini akan sangat membantu perempuan dalam menjalankan tugas, sehingga bebannya sedikit berkurang.
 - Tantangan lain yang juga dihadapi oleh perempuan yang masuk ke dalam ruang publik adalah manakala memiliki karier atau jabatan yang lebih tinggi dari suami. Tentu tidak ada salahnya bila istri melibatkan suami dalam memutuskan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan tugasnya dalam ruang publik. Hal ini akan membuat suami merasa dihargai dan mempunyai andil dalam keberhasilan yang diperoleh istrinya.
- b. Saran bagi peneliti selanjutnya
Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada perempuan yang berada di legislatif, namun juga perempuan yang berada di eksekutif dan yudikatif.

Referensi:

Arri. (2009). *Dukungan Suami Kebutuhan Wanita Karier*. [Online]. Tersedia: <http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1862644-dukungan-suami-kebutuhan-wanita-karier/#ixzz1qTiO9Pvv>. [29Maret 2012].

Baguley, Phill. *Teach Your Self Negotiating*. (2003). United Kingdom.

- Covey, Stephen R. (1997). *7 Habits of Highly Effective People*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hanim, Rayza. (2010). *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Madani Institute.
- Hidayati, Nia. (2011). *Memfaatkan Quality Time*. [Online]. Tersedia: <http://niahidayati.net/memanfaatkan-quality-time.html>.
- Lestari, Ellys. (2009). *Perempuan vs Perempuan*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Mahmada, Nong Darol. (6 April 2008). *Kado Kartini dan Partisipasi Perempuan*. Koran Seputar Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisaputra, Rezkiana. (2018). [Online]. Tersedia: <http://infobanknews.com/apbn-2019-anggaran-kesehatan-naik-200/>. Diakses: 11 mei 2019.
- Saraswati, Tumbu. (2004). *Halo Senayan!: Agenda Perjuangan Politik Perempuan Melalui Parlemen*. Jurnal Perempuan. 35, 1410-153X.
- Sardjono, Maria. A. (2002). *Tiga Orang Perempuan*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Syamsu. (2009). *Mental Hygiene Terapi Psikospiritual untuk Hidup Sehat Berkualitas*. Bandung: Maestro.